



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 135 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
28. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

## Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :

## 1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	26.852.192.452.636,00
b. Dana Perimbangan	Rp	9.387.539.401.653,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	<u>3.277.812.157.401,00</u>

Jumlah Pendapatan

Rp 39.517.544.011.690

## 2. Belanja

## a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	10.046.180.476.314,00
2) Belanja Bunga	Rp	2.191.752.114,00
3) Belanja Subsidi	Rp	0,00
4) Belanja Hibah	Rp	1.999.968.587.301,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.044.598.129.405,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	44.286.271.230,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>11.376.869.462,00</u>

Rp 13.148.602.085.820

## b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	1.815.488.703.448,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	12.641.399.413.173,00
3) Belanja Modal	Rp	<u>10.696.012.194.312,00</u>

Rp 25.152.900.310.930

Jumlah Belanja

Rp 38.301.502.396.750

Surplus

Rp 1.216.041.614.931

## 3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.463.721.530.814,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	3.085.768.369.272,00
Jumlah Pembiayaan Neto		<u>Rp 6.377.953.161.540</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Rp 7.593.994.776.473

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 61030

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
*Rahayu*  
SRI RAHAYU  
NIP. 195712281985032003

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6 = 4 : 3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>40,799,864,826,912.00</b>	<b>39,517,544,011,690.53</b>	<b>(1,282,320,815,221.47)</b>	<b>96.86</b>
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26,304,097,561,000.00	26,852,192,452,636.53	548,094,891,636.53	102.08
1.1.1	Pajak Daerah	22,618,000,000,000.00	23,370,213,237,450.54	752,213,237,450.54	103.33
1.1.2	Retribusi Daerah	500,580,719,000.00	333,787,343,513.00	(166,793,375,487.00)	66.68
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	396,228,781,000.00	397,234,721,942.00	1,005,940,942.00	100.25
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	2,789,288,061,000.00	2,750,957,149,730.99	(38,330,911,269.01)	98.63
1.2	DANA PERIMBANGAN	10,547,537,223,090.00	9,387,539,401,653.00	(1,159,997,821,437.00)	89.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,248,354,757,090.00	9,088,356,935,653.00	(1,159,997,821,437.00)	88.68
1.2.2	Dana Alokasi Umum	299,182,466,000.00	299,182,466,000.00	0.00	100.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,948,230,042,822.00	3,277,812,157,401.00	(670,417,885,421.00)	83.02
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,760,529,427,822.00	1,148,327,253,901.00	(612,202,173,921.00)	65.23
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2,187,700,615,000.00	2,129,484,903,500.00	(58,215,711,500.00)	97.34
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>46,578,865,629,904.00</b>	<b>38,301,502,396,759.00</b>	<b>(8,277,363,233,145.00)</b>	<b>82.23</b>
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,968,960,163,958.00	13,148,602,085,826.00	(1,820,358,078,132.00)	87.84
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	11,140,294,695,356.00	10,046,180,476,314.00	(1,094,114,219,042.00)	90.18
2.1.2	BELANJA BUNGA	4,353,828,000.00	2,191,752,114.00	(2,162,075,886.00)	50.34
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	BELANJA HIBAH	2,231,650,260,000.00	1,999,968,587,301.00	(231,681,672,699.00)	89.62
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1,277,394,740,000.00	1,044,598,129,405.00	(232,796,610,595.00)	81.78
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	61,493,005,000.00	44,286,271,230.00	(17,206,733,770.00)	72.02
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	253,773,635,602.00	11,376,869,462.00	(242,396,766,140.00)	4.48

Nomor Urut 1	Uraian 2	Anggaran Setelah Perubahan 3	Realisasi 4	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp.) 5	% 6 = 4 : 3
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	31,609,905,465,946.00	25,152,900,310,933.00	(6,457,005,155,013.00)	79.57
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,119,478,365,574.00	1,815,488,703,448.00	(303,989,662,126.00)	85.66
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,610,823,722,041.31	12,641,399,413,173.00	(1,969,424,308,868.31)	86.52
2.2.3	BELANJA MODAL	14,879,603,378,330.69	10,696,012,194,312.00	(4,183,591,184,018.69)	71.88
	<b>Surplus / ( Defisit )</b>	(5,779,000,802,992.00)	1,216,041,614,931.53	6,995,042,417,923.53	0.00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	9,463,721,530,814.00	9,463,721,530,814.23	0.23	100.00
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	9,463,721,530,814.00	9,463,721,530,814.23	0.23	100.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9,463,721,530,814.00	9,463,721,530,814.23	0.23	100.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3,684,720,727,822.00	3,085,768,369,272.44	(598,952,358,549.56)	83.74
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	54,037,464,030.44	54,037,464,030.44	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,626,529,427,822.00	2,981,402,216,786.00	(645,127,211,036.00)	82.21
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	58,191,300,000.00	47,928,688,456.00	(10,262,611,544.00)	82.36
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	0.00
	<b>Pembiayaan Neto</b>	5,779,000,802,992.00	6,377,953,161,541.79	598,952,358,549.79	110.36
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		7,593,994,776,473.00	7,593,994,776,473.00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Nomor 135 TAHUN 2014  
Tanggal 9 September 2014

**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH									
ORGANISASI : 1.20.001 DPRD Propinsi 0.01.00.00.0000.000									
KODE REKENING		URAIAN		Angg. Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	PENJELASAN		
1		2		3	4	5 = 4 - 3	6		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				0.00	0.00	0.00			
1.20	001	00	00	5					
BELANJA DAERAH									
1.20	001	00	00	5	1				
				35,991,444,320.00	34,985,493,444.00	(1,005,950,876.00)			
BELANJA TIDAK LANGSUNG									
1.20	001	00	00	5	1	1			
				35,991,444,320.00	34,985,493,444.00	(1,005,950,876.00)			
BELANJA PEGAWAI									
1.20	001	00	00	5	1	1	01		
				25,839,444,320.00	24,833,493,444.00	(1,005,950,876.00)			
Gaji dan Tunjangan									
1.20	001	00	00	5	1	1	01	01	
				25,839,444,320.00	24,833,493,444.00	(1,005,950,876.00)			
Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD									
1.20	001	00	00	5	1	1	03		
				10,152,000,000.00	10,152,000,000.00	0.00			
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH									
1.20	001	00	00	5	1	1	03	01	
				10,152,000,000.00	10,152,000,000.00	0.00			
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD									
<b>JUMLAH BELANJA</b>				35,991,444,320.00	34,985,493,444.00	(1,005,950,876.00)			
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				(35,991,444,320.00)	(34,985,493,444.00)	1,005,950,876.00			
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				0.00	0.00	0.00			
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				0.00	0.00	0.00			
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>				0.00	0.00	0.00			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20  
ORGANISASI : 1.20.380

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI WILAYAH DAERAH, PERANGKAT DAERAH  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 7.00.00.00.0000.000

KODE REKENING										URAIAN	Angg. Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	PENJELASAN
1														
1.20	380	00	00	6	2	4	03	01		Dana Bergulir PPMK Kepada Perorangan dan Kelompok Masyarakat	0.00	(2,400,000,000.00)	(2,400,000,000.00)	
										JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,684,720,727,822.00	2,972,813,569,647.56	(711,907,158,174.44)	
										PEMBIAYAAN NETO	5,779,000,802,992.00	6,490,907,961,166.67	711,907,158,174.67	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO